

Pembangunan Kota I PMI Diperlukan untuk Penanganan Dini Korban

Banjir Tanggung Jawab Gubernur



ISTIMEWA

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bertanggung jawab penuh dalam menyelesaikan masalah banjir, kemacetan, dan relokasi permukiman kumuh di bantaran sungai. DKI Jakarta juga berhak memimpin dan meminta sejumlah kementerian untuk menyelesaikan persoalan tersebut dalam lingkup Jabodetabek.

"Pernyataan Gubernur yang selalu melemparkan tanggung jawab kepada pusat atau pihak lain jika banjir atau macet terjadi adalah salah. Itu tanggung jawab DKI Jakarta atas perintah UU," kata ahli tata kota dari Institut Teknologi Bandung, Jehansyah Siregar, ketika dihubungi Koran Jakarta, Selasa (10/4).

Dia menegaskan tanggung jawab itu tertuang dalam UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam UU tersebut, Gubernur sebagai Kepala Daerah Khusus DKI Jakarta bertanggung jawab langsung pada Presiden. Aspek hukum *lex specialis* itu memberikan ruang penuh kepada Gubernur DKI Jakarta untuk memimpin kementerian dalam menangani sejumlah persoalan di Jabodetabekjur.

"Jadi, kalau lima tahun tidak ada perubahan, berarti gubernurnya gagal sebagai pemimpin dan motor bagi wilayah lain dalam penyelesaian problem Jakarta dan sekitarnya," ujar dia.

Dia menjelaskan Gubernur DKI Jakarta dapat memimpin Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk penyelesaian banjir dengan meminta pembangunan tanggungan air di luar DKI Jakarta.

Kementerian PU, atas perintah Gubernur, kata Jehansyah, langsung menugaskan Dirjen Sumber Daya Air untuk merancang pembangunan waduk dan situ di daerah Bogor dan Depok untuk menampung air kiriman. Begitu juga dengan persoalan relokasi bagi permukiman warga bantaran kali. Gubernur DKI Jakarta dapat merencanakan pembangunan kawasan baru di seluruh wilayah Jabodetabek, yang dapat ditawarkan bagi warga Bantaran Kali.

Menurut Jehansyah, DKI Jakarta harus menyeragamkan proses relokasi warga bantaran sungai dengan program normalisasi tiga sungai milik Kemen PU. Pengerjaan kedua hal, yakni relokasi dan normalisasi, akan memberikan kontribusi yang cepat dalam penanganan banjir dan permukiman kumuh.

Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) DKI Jakarta berusaha mempercepat pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai dan kali yang melintang di Ibu Kota.

Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Ery Basworo, mengatakan sebagian lahan saat ini sedang dalam proses pembebasan lahan untuk normalisasi dan pemindahan permukiman di sepanjang daerah aliran sungai (DAS). Dia menyebutkan sungai dan kali yang sedang dibebaskan ialah Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter.

Peranan PMI

Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, berharap sejumlah pihak atau lembaga ikut berperan aktif dalam penanganan banjir di Ibu Kota. Salah satunya Palang Merah Indonesia (PMI). Lembaga itu dibutuhkan dalam penanganan dini para korban banjir. Reaksi cepat dalam pelayanan korban banjir di Jakarta pekan lalu terbukti membantu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggulangi bencana tersebut.

"Korban banjir merasa terbantu dan terlayani dengan baik dengan kehadiran PMI. Reaksi cepat bermanfaat bagi persoalan kesehatan yang dialami korban banjir," ujar Fauzi Bowo se usai melantik Ketua PMI Provinsi DKI, Rini Sutiyoso, periode 2012-2017 di Jakarta.

Gubernur mengakui anggota PMI terlatih dan tanggap terhadap setiap bencana yang terjadi di DKI Jakarta. Petugas PMI selalu menjadi petugas yang datang lebih awal di lokasi kejadian untuk memberikan pertolongan kepada korban bencana banjir maupun bencana lainnya seperti kebakaran.

Sementara itu, ratusan petugas Satuan Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta melakukan donor darah di PMI Provinsi DKI Jakarta. Kepala Bidang Tata Usaha Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Cheppy, menjelaskan kegiatan donor darah dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian sosial pada masyarakat.

BMKG

Kepala Subbidang Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Harry Tirto Djatmiko, memprediksi hujan berintensitas tinggi disertai angin kencang masih akan terus melanda Jakarta hingga lebih dari tiga hari ke depan.

Harry mengatakan adanya pola tekanan rendah di Samudra Hindia Barat dan daerah Bengkulu menyebabkan konvergensi atau pertemuan massa udara. Hal itu kemudian membuat pertumbuhan awan dan menyebabkan hujan di wilayah Jawa, terutama Jawa bagian tengah dan barat serta Sumatra bagian selatan. "DKI Jakarta termasuk wilayah barat. Potensi curah hujan tinggi dimungkinkan lebih dari tiga hari ke depan disertai angin kencang," kata Harry.

Harry menegaskan di wilayah Jabodetabek, konsentrasi hujan akan berada di bagian selatan Jakarta dan bagian barat. Potensi dan intensitas hujan lebih banyak terjadi di siang dan malam hari dan dapat berlangsung lebih dari tiga jam.

Ia mengimbau warga yang bertempat tinggal di daerah rawan genangan di DKI Jakarta untuk meningkatkan kewaspadaannya sebab daerah Bogor dan Depok intensitas hujannya diprediksi lebih tinggi. Fluktuasi curah hujan harian lebih tinggi yang terjadi di wilayah Bogor dan Depok otomatis akan memengaruhi jumlah debit air dari wilayah selatan menuju utara. "Masyarakat di lokasi rawan banjir diharapkan waspada terhadap banjir kiriman," tegas dia.